REPRESENTASI DEMOKRASI DALAM FILM

"DI BALIK FREKUENSI"

(Analisis Semiotika John Fiske Tentang Representasi Demokrasi Dalam Film "Di Balik Frekuensi" Karya Ucu Agustin)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Sidang Skripsi Program Studi
Ilmu Komunikasi Konsentrasi Humas

Oleh :

Bagus Martantio

NIM. 41810176



PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI KONSENTRASI HUMAS

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

BANDUNG

2015

ABSTRAK

REPRESENTASI DEMOKRASI DALAM FILM "DI BALIK FREKUENSI"

(Analisis Semiotika John Fiske Tentang Representasi Demokrasi Dalam Film "Di Balik Frekuensi" Karya Ucu Agustin)

Oleh :
BAGUS MARTANTIO
NIM. 41810176

Skripsi ini dibawah bimbingan :
Dr.Drs. H.M Ali Syamsuddin, S.Ag., M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Representasi Demokrasi Dalam Film Di Balik Frekuensi. Untuk menjawab masalah di atas, maka peneliti mengunakan sub fokus : Analisis Semiotika John Fiske Realitas, Representasi dan Ideologi untuk menjawab fokus penelitian.

Pendekatan penelitian adalah kualitatif dengan Analisis Semiotika John Fiske. Objek yang di analisis adalah film Di Balik Frekuensi. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka, wawancara mendalam, dokumentasi, dan penelusuran online. Untuk uji keabsahan data menggunakan Perpanjangan pengamatan, Peningkatan ketekunan dalam penelitian dan triangulasi data, Adapun teknik analisis data dengan mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, menarik kesimpulan, serta evaluasi.

Hasil penelitian menunjukan hasil representasi demokrasi dalam film Di Balik Frekuensi sesuai dengan analisis semiotika John Fiske : Realitas, Representasi, dan Idelogi dalam film Di Balik Frekuensi. Realitas, demokrasi di Indonesia sudah mati, Representasi dalam film ini sudah menggambarkan media di Indonesia saat ini, dan Ideologi kapitalisasi media tidak dapat di bendung.

Kesimpulan penelitian ini menunjukan bahwa demokrasi di Indonesia dikuasai oleh pemilik modal. Hanya orang pemilik modalah yang dapat berdemokrasi. Demokrasi dibajak oleh pemilik modal sehingga rakyat tidak dapat mengemukakan pendapat-pendapatnya sesuai esensi dari demokrasi. Adapun saran dari peneliti diharapkan memberikan pembelajaran mengenai demokrasi sejak dini.

Kata Kunci : Demokrasi, Film Di Balik Frekuensi, Analisis Semiotika John Fiske

ABSTRACT

Representation of Democracy in a Film Behind the Frequency

(Analysis Semiotics John Fiske About Representation of Democracy in a Film Behind the Frequency by Ucu Agustin)

Written By:
BAGUS MARTANTIO
NIM. 41810176

This thesis is under the guidance of :
Dr.Drs. H.M Ali Syamsuddin, S.Ag., M.Si

This research aims to understand the representation of democracy in a film behind the frequency. To answer above promblems, the researchers use a sub focus : Analysis Semiocs John Fiske to answer the research focus.

Qualitative research approch, Analysis Semiocs John Fiske. Objects that are in the analysis is the film behind the frequency. Data were obtained throught a literature review, in-depth interviews, documentation, and online searches. To test the validity of the data is using observations extension, increased diligence in research and triangulation of the data, a data analysis technique to collect the data, reduce the data present the data, draw conclusions, and evalution.

The results showed the results of democratic representation in the film behind the frequency corresponding to the semiotic analysis of John Fiske : Reality, Representation and ideology in the film Behind Frequency. Reality, democracy in Indonesia is dead. Representation in this movie have described democracy in Indonesia today, and Ideology capitalization can not be in the weir in Indonesia.

This conclusion shows that democracy in Indonesia is controlled by the owners of capital. Only the owners of capital who can be democratic. Democracy in the plow by the owners of capital so that people can not be Able to express his opinion of the opinion According the essence of democracy. The advice of the Researchers expected to provide early learning about democracy.

***Keywords** : Democracy, Film Behind the Frequency, Analysis Semiotics John Fiske.*

1.1 Latar Belakang Masalah

Dua dawarsa terakhir ini terminologi demokrasi menggema hampir di semua penjuru dunia, bukan hanya saja menjadi icon suatu negara melainkan perjuangan setiap bangsa yang berusaha mengakhiri tirani otoriterisme. Semangat perjuangan yang demikian dapat dilihat dengan munculnya partai partai politik yang menggunakan nama demokrasi**.**

Demokrasi pada hakikatnya adalah komunikasi dan menjadi unsur yang ensensial dalam demokrasi, bahkan melekat pada konsep demokrasi.

> "Pentingnya peranan komunikasi (media) dalam masyarakat yang demokratis sehingga dapat dikatakn bahwa batasan demokrasi banyak di tentukan oleh komunikasi, naik turunnya tingkat demokrasi sangat banyak tergantung pada struktur dan ciri sistem komunikasi (Dahlan, 1999)[1]"

Pers adalah sebagai pilar keempat dalam penegakan demokrasi harus dibebaskan dari intervensi pemerintah dan memberi perlindungan kepada siapa saja yang ingin mengemukakan pikiran dan pendapatnya. Pemberian sebuah kebebasan ini menjadi tuntutan di hampir semua elemen media massa karena media massa dipandang sebagai pencerminan suara masyarakat. Penempatan media sebagai pilar keempat demokrasi menjadi peran untuk ruang publik masyarakat.

Media massa tidak hanya menjadi bagian yang integral dalam politik, tetapi menjadi posisi yang sentral dalam politik. Ketika sebuah media massa diamati banyak sekali sajian film atau pemberitaan di televisi memiliki sebuah muatan politis, propaganda dan sosialisasi politik. Banyak media massa yang di dirikan menjadi sebuah kepentingan-kepentingan politik terkait dengan sebuah kekuasaan atau pemilik modal media massa. Dalam hal ini munculah sebuah dampak yang negatif sehingga banyak penyimpangan penyimpang media massa yang di lakukan

[1] Bahan ajar Adiyana Slamet komunikasi politik

oleh para pemilik modal media massa. Padahal dalam konteks sebuah media di tuntut secara profesional dalam menyangkan sebuah informasi yang di berikan kepada masyarakat.

Hal ini menjadi terlihat sangat gamblang di indonesia, dimana para pemilik keukuasan atau pemilik modal sebuah media menjungjung tinggi kepentingan pribadi ataupun kepentingan politik masing-masing. Media yang bebas menyajikan informasi menjadi kebablasan, maka dalam konteks ini sebuah netralitas media menjadi pertanyaan di lapisan masyarakat, karena para pemilik media merupakan salah satu anggota partai politik sehingga media lebih menonjolkan informasi partai politik tertentu.

Media massa bergerak dalam masyarakat yang ditandai oleh adanya penyebaran kekuasaan yang diberikan kepada individu, kelompok, dan kelas sosial secara tidak merata. Media massa dalam beberapa hal berkaitan dengan strukt.ur politik dan ekonomi yang ada. Di sisi inilah dapat ditelusuri potensi media berhubungan dengan kekuasaan, disaat media dianggap memiliki konsekwensi ekonomis tempat diperebutkannya kontrol dan akses.

> "Isi dari media dipengaruhi oleh beberapa factor yang luas dari dalam dan luar organisasi media. Level-level pengaruh tersebut antaralain teks kerapkali dipengaruhi oleh individu, rutinitas media, kebijakan organisasional, extra media, dan ideologi. (Shoemaker & Reese,1996:11)[2]"

Dalam bentuknya yang paling sering dikenali, media kerapkali dianggap sebagai alat kekuasaan yang ampuh dikarenakan kemampuannya mempengaruhi orang lain. Semenjak pasca 1998 media di indonesia mulai menjamur, Ada berbagai kepentingan di dalam sebuah media massa. Hagemoni kekuasaan pemerintah

[2] Shoemaker & Reese dalam buku Gun Gun Heryanto Dinamika Komunikasi Politik Hiperealitas politik di media massa Hal 139

bergeser ke hagemoni kekuasaan pemilik modal. Ketika sebuah sebuah media beraliansi kepada salah satu politisi maka media massa akan menyebarkan kepentingan-kepentingan tersebut. Media sebagai alat penyebaran ideologi oleh para pemilik kekuasaan dalam artian pemilik kekuasaan bisa pemilik modal atau pun pemerintah. Sesungguhnya cukup banyak alasan untuk menjelaskan bagaimana media massa memiliki keterkaitan erat dengan cara-cara bagaimana kekuasaan dijalankan. Rezim-rezim yang memerintah di dunia, baik liberal maupun komunis, senantiasa memaknai media massa sebagai salah satu hal penting dalam konstruksi kekuasaanya. Sulit rasanya untuk menafsirkan media massa tanpa mengidentifikasi sederet karakteristiknya yang seringkali dipakai untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan.

Melihat dari masalah masalah yang terjadi dalam sebuah media maka munculah sebuah film yang berjudul "Di Balik Frekuensi". Film Di Balik Frekuensi ini mengambil setting di Indonesia. Film ini menggambarkan bahwa media di indonesia sudah tergencet di antara kepentingan pemilik modal dan kuasa. Konglomerasi monopoli sebuah media terlihat di film di Balik Frekuensi. Tranformasi media yang dimana awalnya sebagai saluran untuk menyebarkan informasi dan menjadi ruang publik kini berubah menjadi sebagai sebuah alat kepentingan penguasa atau pemilik modal. Permasalahan yang timbul dalam film ini dimana sekarang media sudah tidak memperdulikan Undang-undang Pernyiaran No.32 tahun 2002. Negara dan institusi yang menjadi "Filter" sebuah media yang akhirnya menyelubungi bias media. Akhirnya sulit di hindarkan karena media memiliki sebuah "Agenda Tersembunyi" kelompok-kelompok kepentingan tertentu yang beroprasi di balik sebuah media hal ini sangat kontras dengan film Di Balik

Frekuensi. Terkait undang-undang penyiaran No.32 tahun 2002 maka terlahir lah sebuah diversity media. Dalam konteks diversity media menghasilkan atas dasar prinsip *diversiy of ownership* dan *diversity of content* larangan memonopoli media dan isi siaran netral atas kepentingan semua golongan. Tetapi lagi lagi Negara dan Institusinya di kurdilkan oleh penguasa media. Ketika pemodal dan politisi maka yang terjadi adalah pengkurdilan institusi.Terkait permasalahan tersebut lagi-lagi pemerintah absen seolah tidak peduli dengan permasalahan ini atau kalah kekuatan. Ruang media massa saat ini cenderung menjadi sebuah arena pertarungan diantara pemilik kekuatan ekonomi, politik maupun budaya. Komisi penyiaran Indonesia merupakan sebuah sebagai institusi atau lembaga Negara yang berfungsi dan berwenang dalam pengawasan penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Dalam kontek mekanisme pengawasan hal ini hanya menjadi intisusi tersebut hanya dalam pengawasan dan memberikan peneguran sebuah media. Perlunya ada sebuah rancangan undang undang dimana institusi Negara ini di berikan secara penuh baik pengawasan maupun penindakan untuk menindak sebuah media yang menyeleweng dari konten penyiaran tayangan.

Di Balik Frekuensi memgungkap bobrok nya sebuah media. Dapat terlihat perang media di stasiun televisi di indonesia menjadi sesuatu yang tidak asing lagi. Demokrasi dalam sudut pandang di dalam media sangat tertutup rapat oleh pemilik modal penerapan di media sudah mulai seperti saat rezim-rezim orde baru. Dalam film Di Balik Frekuensi media indonesia hidup di antara angan-angan untuk tumbuh menjadi institusi tempat menyemai benih-benih profesionalisme dan demokratisasi dilahan politik yang keras oleh friksi dan pertarungan politik.

Di Balik Frekuensi adalah film dokumenter yang diangkat oleh sutradara Ucu Agustin. Film Di Balik Frekuensi film dokmenter yang menayangkan secara jelas siapa dalang yang berada di balik media. Film ini di angkat setelah melihat kisah Luviana seorang jurnalis media di indonesia yang dikeluarkan oleh salah satu media televisi dan cerita seorang bapak yang menjadi salah satu korban lumpur lapindo sidoarjo. Film Di Balik Frekuensi dirilis pada awal tahun 2013 untuk memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia bahwa satu tahun lagi indonesia akan melaksanakan pemilu di tahun 2014. Terlihat bahwa awal tahun 2013 dimana para media massa mengkampanyekan partai-partai politik yang terkait dengan para pemilik modal atau penguasa.

Sekarang terlihat sangat jelas di media indonesia dengan sebuah kepentingan kepentingan yang memliki aliansi dengan partai politik beberapa media di indonesia bertarung. Pertarungan media sudah tidak lazim. Hal ini berdampak pada masyarakat indonesia, pembenturan pembenturan ideologi dimasyarakaat indonesia apakah media tersebuh menginginkan perpecahan di indonesia ? menjadi sebuah pertanyaan penulis ketika keaadaan indonesia seperti ini.

Pada dasarnya film bukanlah hanya sekedar sebuah sajian asik sebagai hiburan semata, akan tetapi film memiliki makna dan pesan dalam bentuk cerita yang disajikan dalam bentuk gambar bergerak dan suara (audio visual). Film merupakan salah satu media massa yang paling banyak diminati oleh banyak orang. Maka dari itu banyak sekali kepentingan kepentingan atau agenda tersembunyi dalam sebuah kajian media. Oleh karena itu peneliti yang menaruh perhatian untuk melakukan kajian terhadap perfilman guna mendapatkan progress lebih lanjut

dalam media penyampaian pesan. Proses pemikiran berupa pencarian ide, gagasan, dan cerita merupakan proses keterampilan artistik yang mewujudkan sebuah ide dan gagasan. Antonio Gramsci dalam bukunya Alex Sobur (Analisis teks media, suatu pengantar untuk analisis wacana, analisis semiotika dan analisis framing) menyatakan bahwa media massa merupakan arena pergulatan antar ideologi yang saling berkopetensi. Gramsci melihat media sebagai ruang dimana berbagai ideologi di representasikan. Ini berarti, di satu sisi media bisa menjadi sarana penyebaran ideologi. Media juga dapat menjadi alat resistensi terhadap sebuah kekuasaan. Media massa dapat menjadi alat untuk membangun dan kultur ideologi yang dominan. Sebagai bentuk dari komunikasi massa, film telah di pakai untuk berbagai tujuan. Namun pada intinya sebagai bagian dari komunikasi massa, film bermanfaat untuk menyiarkan informasi, mendidik, menghibur dan mempengaruhi tetapi pada masa sekarang film lebih banyak di gunakan sebagai alat atau media propaganda. Dalam kode-kode televisi yang diungkapkan dalam teori John Fiske, bahwa peristiwa yang ditayangkan dalam dunia televisi telah di*encoding* oleh kode-kode sosial yang terbagi dalam tiga level yaitu pertama level realitas kedua level representasi dan yang ketiga level ideologi.

Dalam hal ini, peneliti mengangkat sebuah film yang berjudul Di Balik Frekuensi sebagi objek penelitian yang akan diteliti. Dalam Film Di Balik Frekuensi dimana kapitalisme dan liberalisme akan merusak pilar demokrasi karena media massa adalah salah satu pilar utama dalam penegakan sebuah demokrasi. Maka terkait mengenai masalah-masalah kajian di atas maka peneliti mengambil judul Representasi Demokrasi Dalam Film Di Balik Frekuensi.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pertanyaan Makro

Dari uraian dan latar belakang masalah di atas yang telah di jelaskan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. **"Bagaimana representasi Demokrasi dalam film *Di Balik Frekuensi* ?"**

1.2.2 Pertanyaan Mikro

Adapun subfokus yang diangkat masalah berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas adalah sebegai berikut.

1. Bagaimana level **realitas** Demokrasi dalam film *Di Balik Frekuensi* ?
2. Bagaimana level **representasi** Demokrasi dalam film *Di Balik Frekuensi*?.
3. Bagaimana level **ideologi** Demokrasi dalam film *Di Balik Frekuensi* ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana makna Demokrasi dalam film Dibalik frekuensi?

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui realitas makna Demokrasi dalam film *Di Balik Frekuensi*
2. Untuk mengetahui representasi makna Demokrasi dalam Film *Di Balik Frekuensi.*
3. Untuk mengetahui ideologi makna Demokrasi dalam Film *Dibalik Frekuensi*.

METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian diperlukan penyelidikan yang hati-hati, teratur dan terus menerus untuk mengetahui bagaimana seharusnya langkah penelitian harus

dilakukan dengan mengunakan metode penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. (Sugiyono, 2009 : 2).

Penelitian kualitatif pun bersifat empiris. Karena arti empiris sendiri berarti dapat diamati oleh pancaindera. Penelitian kualitatif tentu saja bersifat empiris, hanya saja pengamatan yang dilakukan bukan berdasarkan ukuran matematis yang terlebih dulu ditetapkan peneliti dan harus disepakati oleh pengamat lain, melainkan berdasarkan ungkapan subjek penelitian.

DESAIN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian analisis semiotika John Fiske. Secara metodelogis, kritisme yang terkandung dalam teori – teori interpretatif menyebabkan cara berpikir mazhab kritis terbawa dalam kajian semiotika ini.

Sesuai dengan paradigma kritis, maka analisis semiotika bersifat kualitatif. Jenis penelitian kualitatif memberikan peluang yang besar bagi dibentuknya interpretasi – interpretasi alternative.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

1. **Level Realitas**

Merupakan pertanda sebagai bagian dari prolog memperkuat sebuah penyampaian pesan, karena dalam film dokumenter semua mengadopsi kenyataan-kenyaataan dalam sebuah perekaman gambar bergerak. Dress (Kostum) menujukan kelas sosial dan menggambarkan kelas ekonomi yang dalam film ini menitik beratkan pada bagaimana orang yang tereksploitasi secara pemikiran dan tenagga dan menggambarkan bagaimana kelas pemilik modal. Dalam hal ini pemilik media mampu untuk coba mencabut hak hidup individu maupun kelompok dengan menggunakan media sebagai alat, untuk menyalurkan kepentingan-kepentingan baik itu kepentingan menyelamatkan media dari orang-orang yang kritis dan yang mempunyai jiwa jurnalis maupun kepentingan ekonomi. Demokrasi di metrotv telah mati, surya paloh sebagai pemilik media metro tv dan ketua partai nasional demokrasi tidak menanamkan demokrasi dalam sebuah media. Demokrasi yang di tanamkan di nama partai yang di ketuai surya paloh hanya menjadi sebuah nama dan pajangan di nasional demokrat. Pengaplikasian sebuah demokrasi media di metro tv rusak karena surya paloh tidak menanamkan nilai-nilai demokrasi.

Dress (Kostum) dalam Sequence prolog yang di gunakan Hari Suwandi menggunakan pakaian adat daerah sidoardjo dengan memiliki sebuah pesan bahwa saya merupakan warga sidoarjdo. Dengan pakaian adat yang di gunakan simbolik makna sebagai kekentalan kultur budaya yang mewakili daerah sidoarjdo yang terekploitasi oleh industrial lumpur lapindo. Aburizal bakrie sebagai pemilik industrial lapindo mengamankan isu isu industrial lapindo melalui media nya media tvOne bahwa itu sebagai beban negara. Ketika sebuah pengeboran tidak mungkin tidak ada izin dari pemilik industrial. Bapak Hari Suwandi dalam Sequence prolog terekploitasi di bidang ekonominya. Bapak Hari Suwandi dan warga siduardjo

sebagai korban industrial lumpur lapindo berusaha meminta tanggung jawab kepada pemilik industrial lumpur lapindo.

Lingkungan memperjelas dengan lingkungan-lingkungan kelas sosial yang di gambarkan dalam film Di Balik Frekuensi pada Sequence prolog. Lingkungan jurnalis wanita Luviana berada dalam sebuah lingkungan sosial para kelas pekerja yang memiliki aliansi-aliansi dengan para buruh dan serikat pekerja. Bapak tua Hari Suwandi menunjukan kelas sosial bawah dengan pakaian yang kumuh di perkuat dengan lingkungannya. Lingkungan bapak tua Hari Suwandirumah dan lingkungannya habis tenggelam oleh lumpur akibat dari sebuah industi Lapindo.

Ekspresi pada Sequence prolog Luviana seorang jurnalis menggambarkan ekpresi dalam ketertindasan. Bahasa non-verbal dari ekspresi wajah kekecewaan, kebingungan dan tertidas menjadi pesan yang di sampaikan secara alamiah dalam kajian sebuah dokumenter. Bapak tua Hari Suwandi juga memiliki sebuah hal yang sama dengan ekspresi kekecewaan kepada pemilik modal lumpur lapindo karena tidak memperdulikan nasib para korban lumpur.

Sequence idelogical conten memperkuat Luviana dan Hari Suwandi sebagai kelas soial bawah dengan Dress (Kostum), Luviana dengan seragam serikat buruh dan teman temannya yang menggunakan seragam-seragam buruh, Hari Suwandi dengan pakaian yang kusam dengan celana pendek dan sendalnya. Realitas sebuah demokrasi kita di Indonesia mulai rusak atau mati ketika dalam konteks sebuah demokrasi kekuasaan terbesar itu adalah rakyat. Nilai-Nilai demokrasi segenap luntur oleh para pemilik-pemilik kepentingan pemilik modal.Demokrasi di Indonesia tidak berjalan ketika kelas sosial bawah yang menjalankannya. Ketika

para kelas sosial bawah bersuara dalam media suara mereka tidak tersampaikan. Ruang publik yang sudah di bajak oleh para pemegang kekuasaan di Indonesia.

Pada sebuah ideological content dalam level realitas Sequence ketiga bahwa media yang menjadi pilar penegakan demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi borjuis, pemegang media mempunyai sebuah kekuatan yang tidak terbendung oleh pemerintah sekalipun, dengan istilah pada tvone tidak menayangkan sebuah berita yang independen karena mencakup masalah pemilik modal. Jurnalis tvOne dituntut lebih kritis dalam sebuah pemberitaan di media, tvOne memberitakan bahwa Hari Suwandi bukanlah seorang warga korban lumpur tetapi hanya orang yang mencari sensai hal ini bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi sebuah pemutarbalikan fakta dalam sebuah pemberitaan media, dalam konteks demokrasi tersebut pilar demokrasi menjadi luntur.

Sebuah Ekspesi marah ketika jurnalis tvOne mewawancarai bapak Hari Suwandi disebabkan kekecewaan terhadap media yang tidak jujur dalam pemberitaan kepada masyarakaat, Sehingga bapak tua Hari Suwandi mendapaatkan cemoohan dari masyarakat. Kemudian sebuah aksi yang dilakukan jurnalis wanita Luviana tidak memiliki tanggapan apaapun tentang sebuah masalah kolomerasi media. Ekspresi wajah jurnalis wanita, kawan-kawan jurnalis media, dan para serikat buruh tampak bersemangat untuk menyuarakan aspirasi mereka kepada pemerintah. Pemerintah seolah tutup mata mengenai masalah-masalah rakyat. Tidak ada sebuah penanganan penuh yang di lakukan pemerintah untuk mengatasi masalah konglomerasi media dan masalah-masalah buruh. Tidak patuhnya media terhadap undang-undang penyiaran, sehingga undang-undang hanya menjadi sebuah perarturan yang tertulis saja, tidak ada dalam pengaplikasian dan pemberian sanksi pada media-media di

Indonesia. Semangat undang-undang ini di dorong oleh para jurnalis-jurnalis kritis ini untuk merubah media menjadi Diversity of Content.

Di Orde Baru, juga merupakan hal yang sama. Media massa dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk mendukung legitimasi dan hegemoni penguasa. Saat itu, penguasa negara (pemerintah) berkuasa penuh untuk mengendalikan pemberitaan media massa. Bahkan penguasa dapat membredel media-media tertentu, bila beritanya merugikan kepentingan penguasaan negara. Sehingga, Soeharto sebagai penguasa negara saat itu, dapat bertahan lama karena didominasi oleh berita-berita cantiknya.

Di pada Sequence akhir ideological content bahwa terlihat ada sebuah dominasi paksaan yang tertangkap oleh ekspresi dan gaya bicara yang terbata-bata di depan kamera dengan mata yang melirik kanan kiri seolah bapak tua itu seolah membaca teks, dengan kecurigaan kata kata "EH" yang di katakannya hal tersebut menjadi kecurigaan yang mendalam oleh peneliti. Dalam sebuah tarikannya adalah bahwa tvOne selalu membicarakan masalah lapindo dengan kata-kata lain yaitu lumpur sidoarjo, berbeda sekali dengan metro tv yang selalu menyebutnya dengan lumpur lapindo. Tidak pernah sama sekali tvOne menyebut itu lumpur lapindo karena pemilik industrial yang menyebabkan lumpur tersebut adalah penguasa di tvOne sehingga tvOne selalu menggiring sebuah pemberitaan mengenai lumpur lapindo.

Secara objektif melihat film ini memang benar-benar mencerminkan realitas media yang ada di Indonesia karena dari data, fakta, dan juga dari pengalaman kita melihat apa yang menjadi analisisnya memang membenari itu. Kalaupun memang tentu saja tidak semua informasinya sudah komprehensif karena mungkin baru bisa melihat dari beberapa sisi saja. Mungkin masih banyak hal lain juga yang belum terungkap, tapi cukup menjadi gambaran bahwa film ini mewakili realitas media di Indonesia.

2. Level Representasi

Titik awal narasi yang ingin disampaikan kepada penonton merupakan kejelasan media di Indonesia untuk saat ini. Dari setting latar yang bertempatkan Indonesia merupakan sebuah represntasi demokrasi dalam kehidupan di Indonesia untuk saat ini.

Sebuah (Conflict) konflik yang terjadi antara kedua kelas bawah dan kelas atas dimana Luviana memperjuangkan jurnalis media dan Hari Suwandi memperjuangkan masyarakat korban lumpur. Luviana memiliki konflik dengan pemilik modal dan bapak Hari Suwandi konflik dengan pemilik industri sekaligus pemilik media. Perarungan dua kelas atas dan bawah.

Dialogue (Dialog) yang terjadi di antara kedua tokoh Luviana dan Hari Suwandi bahwa sulit nya mengemukan pendapat di Indonesia ini, banyak sebuah kepentingan elite-elite yang tidak kita sadari sepenuhnya ada apa dibalik semua ini. Pada ideological content bagaimana aksi-aksi yang di perjuangkan oleh mereka untuk sebuah demokrasi dalam kontek kepentingan rakyat lah yang menjadi utama. Karena dalam konteks demokrasi kekuasaan rakyat merupakan sebuah kekuasaan yang paling tinggi. Dalam negara demokrasi, media massa sebagai kontrol sosial. Ia berfungsi untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan wajib menjadi sebagai penyambung lidah kepada masyarakat.

Tetapi dalam Sequence epilog menghasilkan kelas-kelas yang di dominasi tidak dapat menggunakan pendapat dan hak-hak mereka. Kecurigaan peneliti dalam epilog semua narasi yang berbicara, ketika sebuah narasi itu yang berbicara menjadi sebuah memiiliki “topeng” di balik wajah para pemilik modal tersebut. Jurnalis wanita Luviana melaporkan menjemen matro tetapi tidak ada tanggapan dari pihak

pemerintah. Surya Paloh menjadi salah satu ketua partai yang sukses dalam pemilu 2014 dan Aburizal Bakrie menjadi calon presiden dari partai golkar, ada sebuah praktik wacana fasisme kepada Hari Suwandi karena hilang tidak diketahui kemana entah di asingkan atau kemana, kepekaan masyarakat sangat kurang terhadap permasalaahan tersebut. Kekuasan-kekuasan melalui media akan menjadi pintu masuk bagi kaum kapitalis untuk menguasai negara melalui media masa, ramalan mazhab frankruft yang menekankan tentang menjadi sebuah musibah politik di balik industri media menjadi peluang yang besar terjadi di Indonesia, para pemilik modal menggunakan media untuk meraih kekuasaannya. Dengan hal-hal di atas maka pembajakan demokrasi masyarakaat kelas dominasi merepresentasikan demokrasi di Indonesia sampai hari ini.

3. Level Ideologi

Dapat di tarik dari melalui hasil level realitas dan representasi di atas memeperkuat relasi-relasi setiap Sequencenya hubungan kelas atas dan kelas bawah merupakan hubungan kekuasaan. Idelogi mempengaruhi media sebagai penanaman ideologi-ideologi tertentu. Dalam cultural studies dikatakan bahwa di sebukan media mewakili ideologi dari kelas kelas dominan dalam lingkungannya, karena media di atur oleh perusahaan negara dan pemilik modal (sumber).

Penayangan suatu program di media mengenai masalah dalam film Di Balik Frekuensi tidak di tutup kemungkinan kedua media memiliki unsur-unsur politik dalam setiap penayangan berita maupun acara. Penyebaran ideologi-ideologi kelompok tertentu kepada masyarakat terdapat di dalamnya. Dalam perkembangan selanjutnya, Sekolah Frankfurt juga menyatakan bahwa ternyata media bisa

menjadi alat pemerintah untuk mengontrol publik, dalam arti tertentu media bisa menjadi bagian dari ideological state apparatus (Littlejohn, 2002:213).

Demokrasi yang di ada indonesia menganut sebuah demokrasi liberal dimana para pemilik modal mengamankan kepentingan-kepentingannya baik di sektor ekonomi atau pun politik. Dari hasil realitas dan represntasi di atas maka pesan dan makna yang terkadung dalam film di balik frekuensi yaitu demokrasi liberal, sebuah keuntungan untuk Aburizal Bakrie ketika menganut demokrasi liberal dimana Aburizal Bakri mengamankan sektor politik dan ekonominya menggunakan media tvOne. Pengalihan isu-isu mengenai industrial lumpur lapindo dilakukan oleh tvOne sehingga menyebabkan matinya semangat diversity media yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002.

Menyoal matinya diversitu media, ditengah hiruk pikuknya kekuatan media sebagai pilar ke empat demokrasi, Aliansi Jurnalistik Independen melahirkan karya berupa film Di Balik Frekuensi yang didalamnya membuka sesuatu yang kasat mata di media massa, masyarakat belum memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah kajian media tersebut. Dalam bahasa yang sebangun, Louis Althusser memandang media sebagai Aparat Ideologi Negara (Ideological State Apparatuses), yang tidak jauh berbeda dengan Aparat Represif Negara, Polisi, dll). Keduanya sama-sama menindas.

Pertarungan media-media raksasa ini terjadi, sampai hari ini perang dingin kedua raksasa media masih berlangsung. Seorang jurnalis di tuntut untuk bersifat ideal namun nilai-nilai idelisme dari jurnalis tertutup oleh sebuah kekuatan pemilik media dan sekarang pengontrolan tayangan sebuah berita ada di tangan pemilik modal yang memilik afiliansi politik. Jurnalis Luviana bersifat kritis ketika dia

mempertanyakan apakaah nilai tayangan nasdem memiliki sebuah nilai berita? Kritik tersebut membawa jurnalis Luviana berada dalam sebuah dominasi sehingga di non-job kan, idealisme jurnalis menjadi utopis dimta pemilik modal sehingga yang terjadi adanya kapitalisasi media yang membawa media tersebut hanya dijadikan alat penyokong kepentingan orang yang memiliki kapital atau modal dalam media tersebut.

Hadirnya media yang memili unsur politik dimana media ini memiliki afiliasi politik. Sebuah nilai-nilai idealisme para jurnalis media sudah terkalahakan oleh nilai yang memiliki nilai komersial. Memasuki sebuah era reformasi ini Indonesia telah membuka ruang kebebasan pers (Freedom of the press) yang berlandaskan dari pinsip nilai demokrasi untuk menjadi ruang publik masyarakat Indonesia. Tetapi dalam hal ini berkenyataan lain. Pada Sequencebahwa jurnalis tvOne memutarbalikan fakta pemeberitaannya. Oleh karena itu yang berlangsung saat ini sebenarnya bukan lah kebebasan pers (Freedom of press) melainkan pers bebas (free press) Karena semakin baiknya sebuah realitas ruang publik kita akan bisa melihat demokrasinya. Demokrasi dalam suatu negara bisa telihat oleh media massa di negaranya. Pers bebas inilah yang diadopsi oleh para penggiat media di Indonesia, Sebenarnya Undang-undangn No. 32 Tahun 2002 menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik harus tunduk kepada kode etik jurnalistik dan peraturan undang-undang yang berlaku.

Kalau berbicara pelanggaran sesungguhnya aturan atau undang-undang itu dibuat ketika pelanggaran itu memang sudah ada atau sebaliknya, bahkan undang-undang itu dibuat untuk dilanggar, tapi yang pasti bahwa realitas yang ada sekarang kalau bertanya apakah tidak sesuai dengan undang-undang, tidak sesuai dengan aturan

dan etika yang berlaku, tentu karena idealnya kalau berbicara tentang Dibalik Frekuensi berbicara tentang keberadaan ruh atau semangat undang-undang penyiaran bagaimana kita punya semangat Diversity of Ownership kepemilikan, Diversity of Content faktanya memang masih sangat jauh. Demokratisasi penyiaran belum terwujud.

Undang-undang No. 32 Tahun 2002 melahirkan 2 prinsip Prinsip keberagaman kepemilikan (diversity of ownership) Prinsip keberagaman isi (diversity ofcontent). Seiring perkembangan masyarakat lebih kritis dalam mengkonsumsi sebuah tayangan pemilik media masih menafsirkan masyarakat yang bodoh dan pasif. Padahal faktnya masyarakat sekarang cukup kritis untuk mengkonsumsi media, masyarakat mencari second opinion dalam menkonsumsi sebuah media. Pada pilpres 2014 pertarungan kedua media ini menajadi sangat anarki saling berlawanan.

KESIMPULAN

Demokrasi di indonesia telah mati imbasnya karena di indonesia menganut demokrasi liberal. Sistem demokrasi yang liberal membebaskan media dalam sebuah kepemilikan sehingga masyarakat tidak bisa mengemukakan pendapatnya dan tertutup oleh para pemilik modal. Pemerintah seakan tidak tahu mengenai masalah-masalah mengenai pilar demokrasi tersebut. Ketika pemilik modal mereka lebih bebas mengemukakan pendapat dibandungkan dengan masyarakat. Kapitalisasi menjadi hantu yang bergentayangan untuk membunuh nilai demokrasi.

1. **Level Realitas**

Pada level realitas film di balik frekuensi memiliki sebuah keterkaitan yang erat antara demokrasi dengan media. Demokrasi di Indonesia telah mati. Semakin netral media maka semakin baiklah nilai pilar demokrasi. Demokrasi yang harusnya masyarakat menjadi kekuasaan tertinggi karena masyarakat yang memilih pemimpinnya tetapi masyarakat hanya menjadi objek semata. Demokrasi dikuasi oleh pemilik modal dalam realitas di Indonesia.

2. **Level Repsentasi**

Pada level representasi film di balik frekuensi sudah menggambarkan demokrasi di indonesia. Dalam film di balik frekuensi ketika masyarakat tidak dapat menyuarakan suara-suaranya tertutup oleh pemilik modal. Sebagaimana film dibalik frekuensi merupakan sebuah film dokumenter yang mengadopi serpihan-serpihan dari kehidupan nyata di Indonesia. Sehingga dapat di representasikan dalam film ini. Untuk bersuara menjadi sebuah hal yang utopis bagi masyarakat indonesia.

3. **Level Ideologi**

Demokrasi di kalangan kelas sosial bawah tidak dapat di suarakan. Kelas sosial bawah tidak dapat menyuarakan suaranya. Padahal dalam konteks demokrasi masyarakatlah yang memiliki kekuasan tertinggi. Nilai-nilai demokrasi di tutup oleh para kelas pemilik modal. Demokrasi tertutup dan di bajak oleh para penguasa pemilik modal di media massa. Kelas pemilik modal lebih berkuasa di Indonesia. Pemerintah yang harusnya menjadi pelindung masyarakat semuanya menjadi terbalik, pemerintah lebih

melindungi-melindungi pemilik modal dan kapitalisme di indonesia sulit untuk di bendung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ardianto Elvinaro, Erdinaya K, Lukiati, dan Karlinah siti. 2007. Komunikasi Massa Suatu Pengantar, Bandung : Simbiosa Rekatama Media.

Adian, Donny Gahral, 2011. Setelah Marxisme : Sejumlah Teori Ideologi Kontemporer, Jakarta : Depok: Penerbit Koekoesan.

Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif. Jakarta : Prenada Media Grup 2007

Cangara, Hafied, 2004. Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Cangara, Hafied, 2009. Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi. Jakarta : PT. Rajawali Pers.

Danesi, Marcel. Pesan, Tanda, dan Makna, Buku Teks Dasar Mengenai Semiotika dan Teori Komunikasi. Yogyakarta : Jalasutra. 2012.

Effendy, Onong Uchjana. 1993. Ilmu, Teori & Filsafat Komunikasi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Effendy, Onong Uchjana. 1990. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Fauzi, Ibrahim Ali, 2003. Jurgen Habermas: Seri Tokoh Filsafat, Jakarta : Teraju

Fiske, John.1987. Television Culture. E-book : British Library Cataloguing in Publication Data

Fiske, John.2010. Cultural and Communiaction Studies. Yogyakarta: Jalasutra

Heryanto, Gun gun. 2011. Dinamika Komunikasi Politik. Jakarta : PT. Lasswell Visitama

Lexy J. Moleong, 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.

Littlejohn, Stephen W. Publisher, 2009. Teori Komunikasi : Jakarta : Salemba Humanika.

Moleong, Lexy J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Nimmo, Dan, 2006. Komunikasi Politik Komunikator, Pesan dan Media. Bandung : PT : Remaja Rosda Karya.

Pawito, 2009. Komunikasi Politik Media Massa dan Kampanye Pemilihan. Yogyakarta : Jalasutra.

Santoso, Listiyono dkk, 2003, Epistimologi kiri. Yogyakarta : Ar-ruzz

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Subandy, Idi. 2004. Sinarnya "KOMUNIKASI EMPATIK" Krisis Budaya Dalam Masyarakat Kontemporer. Bandung : Pustaka Bani Quraisy.

SKRIPSI

Representasi Kebebasan Pers Mahasiswa Dalam Film Lentera Merah. Yasser Dwi Yasa (skripsi), fakultas ilmu sosial dan politik universitas komputer Indonesia,2012

Representasi Kecantikan dalam Iklan Lux Versi "Luna Magic Spell Play With Beauty". Skripsi Edwina Ayu Dianing Tias (Skripsi), Program Studi IlmuKomunikasi Bidang Kajian Ilmu Jurnalistik, Universitas Diponegero

REPRESENTASI POLITIK APARTHEID DALAM FILM INVICTUS KARYA SUTRADARA CLINT EASTWOOD (Analisis Semiotika John Fiske Mengenai Representasi Politik Apartheid Dalam Film Invictus Karya Sutradara Clint Eastwood Imar Savitr (skripsi), fakultas ilmu sosial dan politik universitas komputer Indonesia,2013

Lain-lain

The League of Thirteen: Media Concentration in Indonesia oleh Merlyna Lim, 2012

Bentuk Fisik Makalah Dede Mulkan

Bahan ajar diversity media marcubuana diversity media

Materi Selama Perkuliahan di Universitas Komputer Indonesia

MATA KULIAH EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL Universitas Muhammadiyah Jakarta Aminah, M.Si